

senian seolah hanya dimengerti oleh mereka yang bergelut di dunia kesenian; dan (5) kesenian hanya dapat tumbuh dan berkembang atas subsidi finansial (birokrasi pemerintah).

Meski cukup banyak diskusi dan penafsiran atas butir pertama hingga ke empat, butir kelima kelihatan yang paling menonjol. Hampir semua dewan kesenian di semua tempat ketika berbicara tentang hal ini sepakat tanpa argumen.

Berbagai kajian tentang kebudayaan kesenian, baik di Indonesia maupun di belahan lain dunia, memperlihatkan bahwa kesenian pada dasarnya memiliki cara maupun kemampuan tersendiri di dalam menyesuaikan antara apa, bagaimana, dalam situasi apa, dan kepada siapa kesenian itu diperuntukkan.

Arah maupun perkembangan kesenian umumnya bertumpu pada seniman sebagai agen/kreator, kritikus/pemikir seni sebagai *knowledge critics* dan masyarakat sebagai apresiator. Di banyak negara maju, dewan kesenian (*art council*) lebih berperan sebagai kurator administratif, satu sisi penting lainnya penunjang perkembangan dunia kesenian itu sendiri.

Dunia kesenian juga merupakan sebuah fenomena sosial-kebudayaan di mana berbagai persoalan-persoalan kesenian tidak hanya dapat dipahami semata dengan kacamata artistik, tetapi juga melingkupi wilayah filosofi, etika, nilai, hingga ekonomi. Sebagai contoh, seorang seniman yang hidupnya berada di lingkup kebutuhan komunitas ritual masyarakatnya tidak membutuhkan sebuah pasar (*market*) untuk hasil karya seninya. Sebaliknya, seniman pop mungkin hidupnya hanya bergantung dari jasa itu.

Pandangan yang menganggap bahwa kesenian hanya dapat hidup dari pertimbangan fasilitas finansial mungkin bisa menjadi sesat kalau ukuran produktivitas sebuah kesenian hanya diukur melalui itu. Cukup banyak jenis kesenian di Indonesia yang memperlihatkan bahwa pencapaian kreativitas, penyelenggaraan, hingga dedikasi berkesenian

tidak semata harus didukung dengan sesuatu yang bersifat finansial.

Lantas, apa yang bisa dikerjakan oleh para birokrat dewan kesenian di Indonesia seandainya institusi ini masih dibutuhkan? Jawabnya, mereka harus lebih jeli dan matang dalam mengagendakan pekerjaan apa yang relevan dengan peran institusi serta memahami dinamika kesenian yang digeluti. Tidak harus seragam seperti partai politik, apalagi berpolitik tanpa paham benar dunia kesenian yang dibicarakan.

Dewan kesenian laiknya institusi perantara, mengantarai negara (bukan pemerintah yang bisa gonta-ganti setiap saat) dengan masyarakat kesenian. Dalam bahasa Garin Nugroho, "Negara berkewajiban mengembalikan sebagian beban pajak yang dipungutnya dari masyarakat untuk kehidupan kesenian" (Forum diskusi "Festival Kebebasan Berekspresi" di Medan bulan Juni lalu).

Sebagai perantara, dewan kesenian bukan institusi yang berhak secara prerogatif memutuskan apa yang sebaiknya dilakukan untuk dunia kesenian. Sebaliknya, ia harus lebih sensitif menafsir apa yang menjadi kebutuhan para seniman sebagai pelaku kesenian.

Menyelesaikan sedikit persoalan kesenian yang memang memiliki arti jauh lebih baik daripada meneriakkan slogan-slogan kosong. Persoalan klasik yang hingga sekarang masih terus terjadi di hampir semua lembaga dewan kesenian di berbagai tempat di Indonesia adalah "misterius"-nya pendistribusian "dana" kesenian yang diperoleh serta tidak tersedianya mekanisme pertanggungjawaban publik kesenian atas apa yang dikerjakan.

Nah, andai masalah ini masih juga terus berulang, bisa jadi benar ungkapan berikut: kadangkala "tipis batas antara seniman dan siluman."

IRWANSYAH HARAHAP

*Etnomusikolog, Staf Pengajar Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara*